R 21290
21754
S
352.407
Azi
P
C1/1 → 130440
2012
UPT PERPUSTAKAAN

PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN – KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi Oleh :

AZIDDIN
01071002082
Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

2012

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh:

Nama	: Aziddin
NIM	: 01071002082
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 8/10

Ketua

Dr. Azwardi, M.Si

NIP 196805181993031003

Tanggal : 28 September 2012

Anggota

Anna Yulianita, SE, M.Si

NIP 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN-KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun Oleh:

Nama	: Aziddin
NIM	: 01071002082
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/konsentrasi	: Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 17 Oktober 2012 dan telah memenuhi syarat untuk di terima.

Panitia Ujian Komprehensih

Indralaya, 17 Oktober 2012

Ketua	Anggota	Anggota
Dr. Azwardi, M.Si	Anna Yulianita, SE, M.Si	Drs. Abbas Effendi M.Si
NIP 196805181993031003	NIP 197007162008012015	NIP 195206101984031001

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dr. Azwardi, M.Si

NIP 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziddin

Nim : 01071002082

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Pembimbing :

Ketua : Dr.Azwardi, M.Si

Anggota : Anna Yulianita, Se, M.Si

Tanggal Ujian: 17 Oktober 2012

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak di sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan.

Indralaya, 17 Oktober 2012
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
0EF5BABF205611343
6000 DJP

AZIDDIN
NIM. 01071002082

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul: **" Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terahadap Belanja Modal Kabupaten-Kota di Provinsi Sumatera Selatan".** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh beberapa komponen variabel yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hubungan yang positif, dan signifikan antara variabel independent dana bagi hasil pajak terhadap variabel dependent belanja modal. Dan variabel independent dana bagi hasil sumber daya alam jg mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap variabel dependen belanja modal. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan
3. Sekertaris Jurusan

4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, 17 Oktober 2012

Aziddin

ABSTRAK

PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK DAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Aziddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap belanja modal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data periode tahun 2001 sampai 2011. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, dimana analisis kuantitatif menggunakan regresi Berganda melalui program Eviews 6.0.

Hasil regresi menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal kabupaten-kota di provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil regresi dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam terhadap belanja modal dilihat Nilai R^2 sebesar 0.591 menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 59,1 persen (signifikan). Hal ini berarti 59,1 persen variabel pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001-2011 mampu dijelaskan oleh variabel dana dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam, sedangkan sisanya sebesar 40,9 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model yang dianggap tetap (*ceteris paribus*).

Kata kunci: ***Belanja Modal, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Regresi Linear Berganda.***

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF TAX REVENUE SHARING AND NATURAL RESOURCE REVENUE SHARING ON THE DISTRICT'S CAPITAL EXPENDITURES IN SOUTH SUMATERA

By Aziddin; Dr. Azwardi, M.Si and Anna Yulianita, SE, M.Si

This study was aimed at finding out the influence of tax revenue sharing and natural resources revenue sharing on the capital expenditures. The data used in this study were secondary ones taken from the period of 2001 to 2011. The quantitative and qualitative analysis were applied to analyze the data using multiple regression in Eviews 6.0 program.

The results of the analysis showed that tax revenue sharing and natural revenue sharing had a positive and significant influence on the districts's capital expenditures in South Sumatra. They also showed that the R^2 obtained was 0.591 which meant that there was a significant influence of the independent variables on the dependent variables (59.1 %). This means that 59.1 per cent of the economic growth from 2001 to 2011 was affected by the tax revenue sharing and natural resources revenue sharing, the other remaining 40.9 percent was influenced by other factors. (*ceteris paribus*)

Keywords: Capital Expenditures, Tax Revenues Sharing, Natural Resources Revenue Sharing, Multiple Linear Regression

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCA SARJANA

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Aziddin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jakarta / 15 Juli 1989
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Komp. Azhar Blok E3 No.4 RT/RW :11/- Kenten Palembang
Alamat Email	: Blackkavaleri@yahoo.co.id

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar	: SD N 12 PG Pondok Bambu Jakarta Timur
SLTP	: SMP N 117 Pondok Bambu Jakarta Timur
SMU	: SMA N 36 Rawamangun Jakarta Timur

Pendidikan Non Formal : -

Pengalaman Organisasi :

- Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai Anggota Divisi Kerohanian (2008-2009).
- Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai Ketua Umum (2009-2010).
- Pengurus Harian Dewan Perwakilan Mahasiswa FE UNSRI (DPM FE UNSRI) sebagai Ketua Umum (2010-2011).
- Panitia Seminar dan Simulasi Perdagangan Saham Oleh HIMEPA (2008)
- Panitia Forum Diskusi Mahasiswa (FDM) Oleh HIMEPA (2008)
- Panitia Olimpiade Ekonomi IV Oleh HIMEPA UNSRI (2009)
- Panitia Forum Diskusi Mahasiswa (FDM) Oleh HIMEPA (2009)

Penghargaan Prestasi : -

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR 130440
TANGGAL 14 2 2013

DAFTAR ISI

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR GRAFIK viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah 9

1.3. Tujuan Penelitian 9

1.4. Manfaat Penelitian 10

1.5 Sistematika penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pengeluaran Pemerintah 12

2.1.2. Penentu- Penentu Pengeluaran Pemerintah 14

2.1.3. Fungsi Pengeluaran Pemerintah 16

2.1.4. Transfer Pemerintah 17

2.1.4.1. Tujuan dan Kriteria Transfer 20

2.1.5 Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah 21

2.1.6 Konsep Dana Bagi Hasil 28

2.1.6.1 Dana Bagi Hasil Pajak 28

2.1.6.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 37

2.1.7 Konsep Belanja Modal 33

2.2. Penelitian Terdahulu..... 39

2.3. Kerangka Pikir..... 40

2.4. Hipotesis..... 40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian..... 42

3.2. Sumber dan Jenis Data..... 42

3.3. Teknik Analisis 43

3.3.1. Analisa Regresi Linear Berganda..... 43

3.3.2. Pengujian Secara Statistik 45

3.3.3. Pengujian Secara Ekonometrika..... 48

3.4. Batasan Operasional Variabel 50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian 52

4.1.1. Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan 52

4.1.2. Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA 54

4.2. Pembahasan..... 58

4.2.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal..... 58

4.2.2. Pengujian Ekonometrik 61

4.2.2.1 Uji Autokorelasi 61

4.2.2.2 Uji Multikoleniaritas 62

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas 64

4.2.3. Pengujian Statistik 66

4.2.3.1 Uji F 66

4.2.3.2 Uji t 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 68

5.2. Saran 69

5.3 Keterbatasan Penelitian 70

DAFTAR PUSTAKA 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkembangan dan Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011 5

Tabel 1.2 Data Perkembangan Dana Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011 7

Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Perkotaan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 53

Tabel 4.2 Nilai Rata-rata Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil SDA dari Tahun 2001-2011 55

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Variabel DBH Pajak dan DBH SDA terhadap Belanja Modal 60

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikoleniaritas Menggunakan Besaran VIF dan Tolerance 63

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan UjiWhite 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner 25

Gambar 2.2 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Pendapat Rostow-Musgrave dan Peacock-Wiseman 27

Gambar 3.1 Uji t-Hitung dan Uji t-Tabel untuk Ho dan Ha 48

Gambar 4.1 Hasil Uji t-Hitung dan Uji t-Tabel untuk Ho dan Ha 67

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pergerakan Hasil uji Heterokedastisitas Menggunakan Uji White 65

UNIVERSITAS DEPARTEMEN
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana cita-cita kita bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang merata di setiap daerah di Indonesia adalah dengan cara menerapkan sistem desentralisasi.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelakasanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yang di mulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang di pandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping itu dana primbangan tersebut, Pemerintah Daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Kebijakan menggunakan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Dearah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat di harapkan dapat digunakan secara efektif dan efesien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Menurut Bastian (2006 : 148-149) penciptaan kemandirian daerah harus didukung oleh sumber pendanaan yang tepat pula. Penerimaan daerah yang tinggi merupakan salah satu syarat utama bagi daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan daerahnya. Penerimaan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di bagi menurut jenis pendapatan menjadi:

a. Dana Bagi Hasil

b. Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi khusus

Jenis dana bagi hasil di rinci menurut objek pendapatan menjadi:

a. Bagi hasil pajak

b. Bagi hasil bukan pajak

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang di tetapkan oleh pemerintah.

3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Akan tetapi setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan keuangan yang berbeda untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Salah satu dana transfer ini adalah dana lokasi umum (DAU) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap tahunnya ditentukan berdasarkan keputusan Presiden dan diatur dalam Peraturan Pemerintah

dan setiap daerah otonom menerima besaran DAU yang tidak sama sesuai dengan kebutuhan fiskal pada daerah tesebut.

Dana transfer dari pemerintah pusat selain daripada dana alokasi umum (DAU) adalah dana alokasi khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu serta mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAU dan DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal.

Dalam era desentralsisai fiskal diharapkan tejadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terumatama sektor publik. Konsenkuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pemerintah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor (Simanjuntak, 2009: 13).

Peningkatan pelayanan publik ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui pebaikan di berbagai sektor yang mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Pemerintah menganggarkan dana untuk pembelian aset tetap untuk mendukung tugas pemerintahan maupun fasilitas publik dalam anggaran belanja modal tiap

tahunnya. Adapun perkembangan belanja modal selama tahun penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan dan Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011

Tahun	Jumlah (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
2005	311.889,97	-33.95
2006	745.496,63	139,03
2007	984.279,76	32,03
2008	891.581,98	-9,42
2009	640.664,24	-28,14
2010	1.032.890,02	41,45
2011	1.043.619,83	1,03
Pertumbuhan Jangka Panjang		**0,9**

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel dalam angka berbagai edisi

Dapat dilihat pada tabel 1.1 perkembangan jumlah anggaran belanja modal yang tiap tahun berfluktuasi pada tahun 2008 dan 2009 sebesar -9,42% dan -28,14%. Hal ini dikarenakan tejadi peningkatan pada belanja rutin, sehingga mengurangi proporsi dari belanja modal. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang tajam pada belanja

modal, karena pada tahun ini merupakan persiapan provinsi Sumatera Selatan untuk menyambut Sea Games 2011.

Dana yang diperlukan untuk membiayai pemerintahan tidak cukup jika hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut maka diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi kesulitan pendanaan diadaerah. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan Dana bagi hasil (DBH) yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Wahyuni dan Adi, 2009 : 5).

Dana bagi hasil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dana bagi hasil dibagi menjadi 2 yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam jadi dana bagi hasil di berikan sesuai potensi pajak dan sumber daya alam yang ada daerah tersebut. Semakin besar potensi pajak dan sumber daya alam di daerah tersebut semakin besar pula DBH yang diterima. Adapun perkembangan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam selama tahun penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011

Tahun	Dana Bagi Hasil		Pertumbuhan (%)	
	Pajak	Sumber Daya Alam	Pajak	Sumber Daya Alam
2005	130,322,000,000	134,799,000,000		
2006	201,646,000,000	258,938,000,000	35,37	47,94
2007	263,691,000,000	444,626,000,000	23,52	41,76
2008	289,821,983,688	451,843,534,641	9,02	1,59
2009	312,711,152,696	494,453,267,606	7,32	8,61
2010	345,331,638,035	980,524,606,405	9,45	49,57
2011	373,067,709,837	784,019,697,936	7,43	-25,06

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat perkembagan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari tahun 2005-2010 yang cenderung meningkat. Pada DBH pajak tidak terjadi peningkatan dan penurunan yang tajam, karena potensi pajak di provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Lain halnya dengan DBH sumber daya alam yang pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 terjadi kelancaran arus distribusi barang sehingga terjadi peningkatan pada eksplorasi sumber daya alam di provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kaitannya dengan belanja modal, dana bagi hasil merupakan sumber dana untuk menambah proporsi belanja modal. Karena pemerintah cenderung mengalokasikan dana yang lebih besar untuk belanja rutin sehingga proporsi untuk belanja modal lebih sedikit. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor publik dalam era disentraliasai fiskal. Peningkatan pelayanan publik ini di harapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah yang nantinya akan merangsang kegiatan ekonomi di daerah dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah untuk memberikan berbagai fasilitas pendukung. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja modal yang lebih besar. Diharapkan dengan adanya potensi pajak dan sumber daya alam yang tinggi dapat memacu pendapatan yang lebih besar bagi penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan mencoba menganalisis ***"Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Kabupaten - Kota di Provinsi Sumatera Selatan"***.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang menarik dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh dana bagi hasil (DBH) pajak dan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) terhadap belanja modal Kabupaten - Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2011?
2. Bagaimana perkembangan dana bagi hasil (DBH) pajak, dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) dan Belanja Modal Kabupaten – Kota di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2001-2011 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis berapa besar pengaruh dana bagi hasil (DBH) pajak dan dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) terhadap belanja modal Kabupaten - Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Mengetahui perkembangan dana bagi hasil (DBH) pajak, dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) dan Belanja Modal Kabupaten - Kota di Provinsi Sumatera Selatan .

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

   Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam mendukung analisis pada penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Operasional

   Penelitian dan penulisan ini dilakukan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat menajadi rujukan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan ekonomi daerah.

1.5. Sistematik Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyusunan penelitian ini, maka penulis menyajikan sistematika penulisan sehingga dapat dimengerti relevasinya dari bab ke bab. Penelitian ini dibagi lima bab yang diuraikan secara garis besar dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab II ini diuraikan mengenai ruang lingkup penelitian metode pengumpulan data, teknik analisis dan batasan variabel penelitian.\

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum mengenai Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Belanja Modal kemudian hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya yang disertai beberapa saran yang mungkin dapat diterima dan diterapkan dalam perkembangan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, Fery. 2012. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan, Kesehatan, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia Tahhun 2006-2010. *Skripsi,* Universitas Padjadjaran, Bandung.

Astria, Sheilla A. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.2012. *Sumsel dalam angka berbagai edisi*. BPS. Palembang: BPS.

Basri, Zainal. Yuswan Subri Mulyadi, 2003. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Bastian, Indra, 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

D.J. Mamesah (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia .2012. Data Dana Bagi Hasil Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011. DJPKKKRI. Jakarta: www.djpk.depkeu.go.id/ diakses pada tanggal 12 februari 2012.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

Harahap, Alfn H. 2010. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*. Medan : USU.

Kunarjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pebangunan.* Jakarta. Universitas Indonesia.

Kuncoro, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Tesis S2 UII, Yogyakarta

Putriani, Sri. 2011. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Periode 1999-2009. *Skripsi.* Universitas Hasanuddin, Makassar.

Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Saputra, Septian. 2012 Analisis Kemandirian Keuangan Keuangan Daaerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-20110. *Skripsi,* Universitas Sriwijaya, Indralaya.

Simanjuntak, Gunawan. 2009. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi.* Medan : USU. Dipublikasikan

Simbolon, Bennyly Pangihutan Jouli. 2011. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi,* Universitas Sumatera Utara, Medan.

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar - Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Edisi Revisi.* Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.

Syahputra, Indra. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daeah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis,* Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wahyuni dan Adi, Hari Priyo. 2009. Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Bali). *Jurnal.* Surabaya.

Yani, Ahmad 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di. Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta